



IMPLEMENTASI PENDATAAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS DI DESA SUKA MAKMUR)

Sri Ulina Sri Ulina¹, Bengkel Ginting², Malida Putri³

Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara,
Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: sriulinag5@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah yang berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program ini memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan harus mengikuti syarat-syarat yang ada. Awal Pendataan yang dilakukan dalam menentukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dengan mengikuti mekanisme pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun setelah itu pendataan dilakukan dengan pengusulan DTKS yang dimana pengusulan ini dilakukan oleh pihak desa atau masyarakat miskin yang mengajukan diri untuk diusulkan ke pihak Dinas Sosial yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap pengusulan DTKS tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Bagaimana proses pelaksanaan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Suka Makmur. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai implementasi pendataan Program Keluarga Harapan (PKH). Teknik pengumpulan data dengan studi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bagaimana proses pendataan yang sudah dilakukan dan juga dapat diketahui bagaimana pemutakhiran data, verifikasi sampai pada penyaluran dana PKH terhadap RTSM yang menerima manfaat. Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pendataan Program Keluarga Harapan ini sudah berjalan dengan baik walau masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya.

Kata Kunci: Implementasi Pendataan, Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT

The Family Hope Program is one of the government programs that seeks to develop a social protection system for the poor in Indonesia. This program provides assistance in the form of cash to Very Poor Households (RTSM) provided that they

must comply with the existing requirements. The initial data collection was carried out in determining the recipients of the Family Hope Program (PKH) assistance by following the data collection mechanism from the Central Statistics Agency (BPS), but after that the data collection was carried out by proposing DTKS where this proposal was carried out by the village or poor communities who volunteered to proposed to the Social Service which already has responsibility for the DTKS proposal. The purpose of this study was to see how the process of implementing the data collection for the Family Hope Program (PKH) in Suka Makmur Village. The research method is descriptive qualitative to get a clear picture of the implementation of data collection for the Family Hope Program (PKH). Data collection techniques with observational studies, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it can be seen how the data collection process has been carried out and can also be seen how the data updating, verification and distribution of PKH funds to RTSM who receive the benefits can be seen. After conducting the research, it can be concluded that the process of implementing the data collection for the Family Hope Program has been going well even though there are still shortcomings in its implementation.

Keywords: *Implementation of Data Collection, Family Hope Program (PKH)*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar seperti makanan dan non-makanan baik itu secara individu, keluarga, maupun kelompok yang dimana kondisi ini sangat rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial. Kemiskinan bukanlah hal yang baru lagi untuk didengar karena kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga Maret 2021 mencapai 27,54 juta penduduk dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan dengan periode Maret 2020 yang dimana jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Kalau berdasarkan persentasenya, penduduk miskin di bulan maret 10,14 persen, ini turun 0,05 persen jika dibandingkan dengan September 2020. (Margo Yuwono, 2021)

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara (Sumut) pada September 2020 sebesar 1,36 juta penduduk, angka tersebut bertambah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di bulan Maret 2020 yang berjumlah 1,28 juta orang, namun

jika dilihat pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin berhasil turun menjadi 1,34 juta penduduk. (Monavia, 2021)

Naik turunnya jumlah kemiskinan di Indonesia membuat pemerintah harus segera menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut, oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari program penanggulangan berbasis bantuan social, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil.

Salah satu program berbasis bantuan social dari pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia mengeluarkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini melalui Kementrian Sosial yang dimana nantinya program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang social. Program ini dibuat untuk mengembangkan sistem perlindungan social terhadap warga miskin di Indonesia.

PKH diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM). Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari basis Data Terpadu hasil Pendapatan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis keluarga.

Sedangkan, di Sumatera Utara mulai penerapan bantuan PKH pada tahun 2015 dan mulai pencairan dana PKH tahun 2016, Kabupaten Deli Serdang mulai penerapannya sejak tahun 2015 dan mulai pencairan dana PKH pada bulan Desember 2016.

Ditinjau dari data Dinas Sosial SUMUT (2018), diketahui bahwa penerima bantuan PKH di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 37.758 jiwa. jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Deli Serdang tersebar ke seluruh kecamatan, yaitu sebanyak 22 kecamatan. Di Kecamatan Sibolangit, sebanyak 667 orang telah terdata menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Lalu, salah satu desa yang tercatat mendapatkan bantuan PKH yaitu Desa Suka Makmur di Kecamatan Sibolangit, Sumatera Utara. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Suka Makmur telah berlangsung sejak tahun 2015.

Bantuan program keluarga harapan ini sangat berguna dan membantu bagi masyarakat miskin di Desa Suka Makmur. Bahkan respon masyarakat terhadap bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangatlah besar, hal ini terbukti dari

keterlibatan peserta penerima bantuan PKH dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan dengan pendamping selama sebulan sekali.

Dari data yang didapatkan oleh BPS, maka pada tahun 2015 telah ditetapkan ada duabelas RTSM sebagai penerima bantuan PKH karena hanya merekalah telah memenuhi syarat atau kriteria, dan akan menerima pencairan pada tahun 2016, namun berhubung pihak BPS terakhir melakukan pendataan di tahun 2015, maka proses pendataan selanjutnya dilakukan dengan pengusulan DTKS. Pengusulan DTKS itu dilakukan oleh pihak desa, pihak desalah yang akan mengusulkan nama-nama masyarakat miskin ke Dinas Sosial agar bisa mendapatkan bantuan PKH, dan masalah apa-apa saja poin atau kriteria yang layak untuk menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) itu mengacu pada blangko verifikasi dan validasi data DTKS, maka dari itu di tahun 2016 terdapat data tambahan yang diterima dari pihak Dinas Sosial bahwa ada sebanyak sepuluh RTSM yang akan menerima bantuan PKH karena telah memenuhi kriteria dan akan menerima pencairan pada tahun 2017, maka jumlah penerima bantuan pkh pada tahun 2017 adalah sebanyak 22 peserta.

Dari tahun 2017 hingga tahun 2018 penerima bantuan PKH masih dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, tahun 2019 telah diterima data tambahan bahwa bertambah sebanyak dua RTSM yang tercatat sebagai penerima bantuan baru di Desa Suka Makmur. Kemudian, Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020, terdapat data tambahan bahwa penerima bantuan PKH bertambah sebanyak tujuh keluarga. Sehingga tahun ini, telah tercatat sebanyak 31 keluarga yang memperoleh bantuan PKH, namun berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, ditemukan permasalahan pendataan yang masih kurang tepat. Terkait pemerataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai masih belum tepat sasaran, dan masih ada keluarga yang sangat memerlukan bantuan program ini tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.

Karena kurangnya kepedulian dan minimnya rasa ingin tahu dari kelompok masyarakat juga menyebabkan banyak masyarakat miskin cenderung terlambat untuk mengetahui informasi mengenai program yang telah direalisasikan oleh pemerintah sehingga mereka tidak terdata sebagai penerima bantuan PKH, oleh karena itu seharusnya pendataan dilakukan secara langsung atau lebih tepatnya yang bertugas mendata langsung turun menemui satu persatu masyarakat miskin agar mereka yang sepatasnya menerima bantuan program keluarga harapan ini terdata.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Suka Makmur yang difokuskan proses pendataan awal sebelum ada nama-nama pada penetapan rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berangkat dari permasalahan diatas lah maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap bantuan PKH tersebut. Lebih spesifik, penelitian ini akan mengkaji tentang : **“Implementasi Pendataan Penerima Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Suka Makmur)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan dan menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Bungin (2011: 68) menyatakan bahwa tujuan dari digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam sebuah penelitian adalah untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena nyata yang ada pada masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dimana pada proses penyimpulan dari hubungan fenomena-fenomena penelitian yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah sangat ditekankan. Hal ini sejalan dengan tujuan dilakukannya penelitian ini dalam melihat bagaimana proses pelaksanaan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Khususnya di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit. Peneliti memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa Suka Makmur termasuk ke dalam daftar desa yang menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan peneliti melihat bahwa bantuan program keluarga harapan yang ada di Desa Suka Makmur ini masih belum tepat sasaran.

Disamping itu, penentuan informan pada penelitian ini merupakan orang yang mampu memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dengan kata lain, informan ditujukan untuk orang yang paling mengerti dan mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan subyek penelitian yang nantinya akan menjadi informan dalam memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian (Suyanto, 2008: 171). Adapun informan dalam penelitian ini meliputi, Informan Kunci (Kepala Desa Suka Makmur): Informan Utama (Pihak BPS, Kepling, dan Koordinator PKH Kabupaten Deli Serdang): Informan Tambahan (Pendamping PKH, Koordinator Pendamping PKH, dan salah satu masyarakat miskin yang

layak menerima bantuan namun tidak terdata). Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Huberman & Miles (dalam Idrus, 2011: 148) menyebutkan tiga kegiatan yang membentuk siklus analisis data kualitatif, yaitu yang pertama adalah reduksi data atau merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan penelitian pada hal-hal penting untuk mencari tema dan pola penelitian yang dapat memudahkan peneliti mengumpulkan data yang sesuai. Kedua, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, di mana hal ini dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Terakhir ialah kegiatan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data terkumpul dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan semua data atau informasi yang diperoleh ke dalam penjelasan runtut, di mana kesimpulan itu sendiri harus mampu menjawab asumsi awal peneliti terkait masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan pendataan yang dilakukan adalah sebagai berikut: jadi sebelum Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) melakukan pendataan di tahun 2015, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sudah memiliki data masyarakat miskin. maka dari itu PBDT memakai data dari PPLS 2011, dan tidak hanya itu PBDT juga memakai data dari Kementrian, dari Kabupaten/Kota, dan dari Provinsi yang memberikan bantuan secara mandiri terhadap masyarakat miskin. Misalnya pemerintah Sumatera Utara memberikan bantuan subsidi pupuk pada rumah tangga miskin, bantuan-bantuan secara mandiri yang diberikan itu di laporkan ke pusat misalnya ke Kemensos sehingga terdatalah masyarakat miskin. Data-data dari Kemensos itu juga dipakai oleh pihak pendata, jadi ada data dari PPLS dan ada juga data dari bantuan-bantuan program.

Jadi sebenarnya pihak pendata (BPS) itu sudah punya fre list orang-orang miskin dari PPLS, data program dari kementerian, lembaga, dan data dari kabupaten/kota. Itulah yang dilakukan pada saat PBDT 2015 dan selanjutnya akan dilakukan Verifikasi. Tahap Verifikasi inilah yang dilakukan pertama kali dengan cara rembuk atau diskusi. Diskusinya melibatkan kadus,toga,tomas,dan masyarakat miskin. Sebelumnya pihak pendata (BPS) sudah punya fre listnya dan fre list setiap dusun juga sudah ada pada mereka, jadi setiap dusun itu ada dikasih tanda bintang, itu adalah

tanda yang dibuat untuk masyarakat yang dianggap miskin (meskipun itu belum tentu benar), namun pihak pendata menganggap bahwa mereka miskin. Semua penduduk miskin yang diberi tanda bintang itu harus hadir dalam rembuk atau diskusi yang sudah dikatakan sebelumnya, dan dari pihak BPS yang hadir atau ikut dalam rembuk ini ada Koordinator Statistik dan Fasilitator. Fasilitator inilah yang memimpin rembuk atau diskusi yang diselenggarakan.

Cara pihak pendata menentukan atau mendata masyarakat miskin yaitu dengan bertanya pada orang-orang yang ada di dalam rembuk tersebut (Kadus, Toga, Tomas, dan semua masyarakat yang dianggap miskin) misalnya si A, Fasilitator akan bertanya apakah si A ini benar-benar miskin atau tidak. Jadi karena semua sudah ada disitu maka tidak boleh bohong, kecuali semua pihak yang ada di situ sudah bekerja sama sehingga semua dikatakan miskin. Jika mereka semua sepakat mengatakan miskin maka orang-orang tersebut akan tetap dimasukkan dalam fre list. Selanjutnya fasilitator akan bertanya lagi, apakah masih ada masyarakat yang benar-benar miskin belum masuk? Kalau mereka bilang ada maka akan dimasukkan lagi dalam fre list jadi semua orang-orang miskin di desa tersebut otomatis sudah masuk.

Setelah rembuk dilakukan, maka PBDT 2015 mulai melakukan pendataan rumah tangga miskin ke rumah rumah. Pendataan ini memakai kuesioner, ada item pertanyaan yang disiapkan untuk masyarakat miskin, contohnya seperti berapa jumlah anaknya, berapa yang masih sekolah, bagaimana pendapatannya, dia punya aset apa saja, dan masih banyak lagi, namun itu hanya pertanyaan biasa atau sederhana yang tidak mempersulit mereka. Setelah itu barulah masuk ke tahap pengolahan (Entri). Hasil entri yang sudah diklaim itulah yang akan diserahkan kepada TNP2K, nanti TNP2K lah yang akan mengeluarkan 40% RT (Rumah Tangga) miskin, Badan Pusat Statistik (BPS) hanya sampai tahap pengolahan akhir, namun Pihak BPS terakhir melakukan pendataan pada tahun 2015. (*Informan Utama I, Hot Bonar, SST, Koordinator Fungsi Statistik Sosial*)

Pendataan selanjutnya dilakukan dengan pengusulan yang dimana masyarakat miskin akan mengajukan diri ke pihak desa untuk diusulkan sebagai penerima bantuan PKH dan pihak desa akan melakukan pengusulan kepada pihak Dinas Sosial. Pengusulan yang dimaksud adalah warga yang dianggap miskin atau masyarakat miskin itu mengajukan diri ke tingkat desa atau pihak desa juga bisa mendata masyarakatnya yang miskin untuk diajukan pada pengusulan DTKS, Jadi ada alur atau tahapannya yang harus diikuti. Setelah melalui alur atau tahapan dari pengusulan DTKS barulah lanjut mengajukan ke Dinas Sosial untuk mengusulkan penerima bantuan PKH. Untuk masalah apa-apa saja poin atau kriteria-kriteria yang layak atau yang cocok untuk menjadi penerima bantuan PKH itu mengacuh pada blangko

verifikasi dan validasi DTKS. disitulah ada beberapa yang harus di isi masyarakat miskin yang diusulkan atau mengusulkan diri untuk menjadi penerima bantuan pkh. Jadi proses pendataan itu sudah tidak dilakukan oleh pihak BPS melainkan melalui pengusulan DTKS yang dimana pihak desa yang mengusulkan masyarakatnya ke Dinas Sosial. (*Informan Utama III, Viktor Patar Pasaribu, Koordinator PKH Kabupaten Deli Serdang*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa implementasi pendataan penerima program keluarga harapan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa keluhan terhadap bantuan PKH. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan bahwa informan utama 1,2 dan 3 mengatakan bahwa implementasi pendataan penerima bantuan program keluarga harapan di Desa Suka Makmur sudah berjalan dengan baik, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bonar selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial bagian pendataan di Kabupaten Deli Serdang dan Bapak Ranogi Bangun selaku Kadus di Desa Suka Makmur yang dimana sebelumnya merekalah yang melakukan pendataan di Desa Suka Makmur, begitupun dengan Bapak Viktor selaku Koordinator PKH di kabupaten Deli Derdang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap pengusulan DTKS yang dimana merekalah yang akan bertugas memverifikasi data-data terbaru dari pengusulan tersebut.

Bahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Suka Makmur sudah menjalani fasilitas kesehatan dan juga pendidikan. Dibiidang ksehatan sendiri sudah berjalan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah, sedangkan pada bidang pendidikan sudah mendaftarkan dan juga memastikan kehadiran anggota keluarga PKH satuan pendidikan jenjang sekolah dasar sampai menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial, memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari umur 70 tahun. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari PKH tersebut sudah berjalan dengan baik, namun masih ada yang menyatakan bahwa pemeintah masih kurang baik dalam memilih sasaran bantuan PKH tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori George C.Edwards III (1980), teori kemiskinan dari Suharto dan teori pemberdayaan masyarakat dari Mubarak (2010). Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), proses tersebut dilaksanakan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Berikut penjelasannya:

1. Komunikasi adalah suatu program yang hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti bahwasannya secara keseluruhan komunikasi yang dilakukan oleh para informan sudah cukup baik. Informan kunci kepala Desa Suka Makmur sendiri sudah melakukan komunikasi seperti melakukan sosialisasi yang baik dengan masyarakat miskin yang belum dan sudah menerima bantuan PKH. Begitupun dengan Informan Utama I yaitu Pihak BPS yang dimana awalnya merekalah yang bertugas melakukan pendataan, mereka melakukan pendataan juga sudah baik karena sebelum turun ke rumah rumah pihak BPS sudah melakukan rembuk/diskusi dengan pihak terkait terlebih dahulu jadi komunikasi yang terjalin antara pihak BPS dan pihak terkait juga sudah baik. Sama halnya dengan pengamping PKH yang ada di kecamatan juga sudah melakukan komunikasi yang baik dengan para penerima manfaat karena mereka juga melakukan pertemuan kelompok setiap bulannya.
2. Sumber Daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti bahwasannya keberhasilan implementasi dilihat dari staf yang bertugas, Staf yang bertugas melakukan pendataan yang awalnya dilakukan oleh pihak BPS yaitu informan utama I mulai dari data yang diterima dari kemensos, data dari pihak desa sampai pada tahap verifikasi di Desa Suka Makmur sudah cukup memadai dan cukup kompeten dibidangnya. Hal ini dapat dilihat saat staf menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas mereka, dan kepatuhan staf atau pelaksana terhadap peraturan yang ditetapkan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan informan, implementasi pendataan dalam penelitian ini memiliki disposisi yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap pelaksana saat melakukan tugas mereka, contohnya pada saat pihak BPS melakukan pendataan seperti mendata sesuai fakta yang ada di lapangan, menyesuaikan

data yang ada pada mereka dengan data yang ada di lapangan (mulai dari pendataan sampai pada tahap verifikasi) itu menunjukkan bahwa sikap pelaksana dalam melakukan tugas mereka sudah cukup baik

4. Struktur Birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti bahwasannya pada penelitian ini, struktur birokrasi sangat dipengaruhi terhadap implementasi pendataan penerima PKH di Desa Suka Makmur. Terbukti dengan proses pendataan yang dilakukan oleh pihak BPS informan utama I yang secara bertahap dan berlanjut mulai dari rembuk atau diskusi yang dilakukan dengan pihak terkait sampai ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, jelas terlihat bahwa struktur tersebut sangatlah panjang, dari hasil wawancara dengan informan kunci, informan utama I, informan utama II mengatakan bahwa wewenang yang menetapkan bantuan tersebut adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pandangan suharto dalam teori kemiskinan mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu masalah keterbatasan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup namun dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini di Desa Suka Makmur sehingga kemiskinan di desa tersebut dapat teratasi secara perlahan, hal tersebut diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci yaitu kepala Desa Suka Makmur. Begitupun menurut pandangan Mubarak (2010) yang mengatakan bahwa teori pemberdayaan dilakukan dengan membangun daya masyarakat, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya, dan dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Suka Makmur masyarakat bisa mengembangkan bantuan yang diterima dengan wirausaha seperti membuka kedai kecil-kecilan sehingga masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut dapat berkembang dan bantuan yang mereka terima guna mencukupi kebutuhan mereka.

Selama proses pengumpulan data, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pendataan sudah dilakukan dengan baik. Meskipun masih ada masyarakat yang belum terdata itu bukan karena kesalahan pihak pendata tapi masyarakatnya yang masih kurang memiliki kesadaran diri dan rasa peduli terhadap program yang diberikan pemerintah. Adapun masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH ini ialah masyarakat yang kurang memiliki kesadaran diri contohnya seperti informan tambahan III, ibu hellsa adalah salah satu masyarakat yang kurang mampu di Desa Suka Makmur tersebut akan tetapi beliau tidak menerima bantuan dari program keluarga harapan ini karena kurangnya rasa kepedulian akan program yang

dilakukan pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ibu helsa ini dulu pernah bertanya kepada pihak desa kenapa beliau tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun pada saat itu pendataan masih dilakukan oleh pihak BPS, berbeda halnya dengan sekarang yang dimana pendataan sudah bisa dilakukan pihak desa atau bisa juga masyarakat mengajukan diri kepada kadus atau pihak desa agar di usulkan sebagai penerima bantuan PKH, namun ibu helsa ini sudah tidak pernah lagi bertanya mengenai bantuan program keluarga harapan kepada pihak desa atau kadus maka dari itu sampai saat ini ibu helsa tidak pernah menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan. Begitupun dengan lansia yang tidak menerima bantuan dari PKH, hal tersebut bukan karena masalah pendataannya melainkan saat ini bantuan untuk lansia sudah berbeda. ASLUT (Asistensi Lanjut Usia Terlantar) ini merupakan program bantuan yang diberikan pemerintah untuk lansia yang sudah tinggal sendiri atau tidak memiliki ahli waris. Maka dari itu lansia yang tidak memiliki ahli waris sudah tidak bisa menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini lagi begitupun dengan sebaliknya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai proses pelaksanaan pendataan Program Keluarga Harapan di Desa Suka Makmur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses atau mekanisme pelaksanaan pendataan Program Keluarga Harapan di Desa Suka Makmur disimpulkan sudah berjalan dengan baik, hal tersebut bisa dilihat dari sistem pendataan awal yang dimulai dari pihak BPS sampai pada saat ini yang dimana sistem pendataan sudah dilakukan melalui sistem pengusulan DTKS yang sudah cukup jelas meskipun masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat itu bukan karena proses pendataan yang bermasalah melainkan pada masyarakatnya sendiri yang masih kurang memiliki kesadaran dan rasa ingin tau terhadap program/bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan melalui teori implementasi yang memiliki empat variabel juga dapat dilihat bahwa proses pendataan yang dilakukan di Desa Suka Makmur sudah baik karena melibatkan semua pihak terkait.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Kepada dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dari awal hingga akhir, juga kepada

Kepala Desa Suka Makmur, kepada pihak BPS, kepada Kepling, kepada Koordinator PKH Deli Serdang, dan kepada Pendamping PKH di Kecamatan Sibolangit yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian dan juga wawancara sehingga seluruh kegiatan penelitian dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
- [2.] Sjaafari, A. 2014. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [3.] Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulirtyastuti. (2012) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media
- [4.] Khomsan, A dkk.(2015) Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [5.] Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- [6.] Suharto, E. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
- [7.] Chambers, R. (1983). Rural Development, Putting the Last First. Londong: Longman.
- [8.] Chambers, R. (1996). PRA: Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius Oxfarm Yayasan Mitra Tani.
- [9.] Idrus, M. (2011). Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- [10.] Kuncoro, M. (2002). Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: YKPN.
- [11.] Moleong. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Puskadarya.
- [12.] Rukminto, A. I. (2003). Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. *Semantics Scholar*.
- [13.] Singarimbun, M. & Efendi, S. (1989). Metode Penelitian Survei. LP3S. Yogyakarta.
- [14.] Sugoyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Percetakan Alfabeta.
- [15.] Suyanto, B. (2013). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana.